

LAPORAN KINERJA (LAKIP)

2021



DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN BOMBANA

KATA PENGANTAR

Puji syukur senantiasa kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya sampai saat ini kita masih diberi kesehatan sehingga dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bombana Tahun 2021.

Sesuai dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja instansi Pemerintah, setiap instansi pemerintah wajib menyusun dan menyampaikan Laporan Kinerja Tahunan paling lambat 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Laporan kinerja ini menggambarkan dinamika Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bombana sepanjang tahun 2021 yang dimaksudkan sebagai pertanggung jawaban terhadap penggunaan seluruh sumber daya dengan menerapkan strategi pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bombana sebagaimana tertuang di dalam Dokumen Perubahan Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bombana Tahun 2017 - 2022 dan Dokumen Perubahan RPJMD Kabupaten Bombana Tahun 2017 – 2022.

Selain itu, laporan akuntabilitas ini juga berperan sebagai alat kendali dan penilaian kualitas kinerja secara terukur, serta alat untuk mendorong peningkatan kinerja demi terwujudnya pemerintahan yang akuntabel di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bombana. Ucapan terima kasih dan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah bekerja keras melakukan segala daya dan upaya hingga terselesaikannya laporan kinerja ini.

Rumbia, Februari 2021

Kepala Dinas
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Bombana,



Ir. SYAHRUN, S.T., M.P.W.K.

Pembina Tk. I Gol. IV/b

NIP. 19730809 200604 1 004

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL.....	iii
DAFTAR GAMBAR.....	iv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1. 1. LATAR BELAKANG.....	1
1. 2. TUGAS DAN FUNGSI.....	1
1. 3. STRUKTUR ORGANISASI.....	2
1. 4. ASPEK STRATEGIS ORGANISASI.....	6
1. 5. PERMASALAHAN UTAMA.....	6
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	7
2. 1. RENCANA STRATEGIS.....	7
2. 2. RENCANA KINERJA TAHUNAN.....	9
2. 3. PENETAPAN KINERJA.....	9
BAB III AKUTABILITAS KINERJA.....	13
3. 1. PENGUKURAN KINERJA.....	13
3. 2. ANALISA CAPAIAN KINERJA.....	15
.....	19
3. 3. REALISASI ANGGARAN.....	36
BAB IV PENUTUP.....	42

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Skala Pengukuran Capaian Kinerja.....	14
Tabel 3.2 Pengukuran Capaian Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.....	14
Tabel 3.3 Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran 1	15
Tabel 3.4	18
Tabel 3.5 Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Penunjang Pencapaian Sasaran 1	20
Tabel 3.6 Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran 1	21
Tabel 3.7 Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran 1	25
Tabel 3.8 Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Penunjang Pencapaian Sasaran 2	26
Tabel 3.9 Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran 3	27
Tabel 3.10 Program dan Kegiatan Penunjang Pencapaian Sasaran 3	29
Tabel 3.11 Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran 4	30
Tabel 3.12 Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Penunjang Pencapaian Sasaran 4	32
Tabel 3.13 Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran 5	33
Tabel 3.14 Program dan Kegiatan Penunjang Pencapaian Sasaran 5	34
Tabel 3.15 Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran 5	35
Tabel 3.16 Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Penunjang Pencapaian Sasaran 6	35
Tabel 3.17 Perbandingan antara Capaian Kinerja dan Realisasi Keuangan.....	37

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bombana	5
Gambar 3.1 Kegiatan rekonstruksi jalan kabupaten dengan aspal dan rigid beton	18
Gambar 3.2 Kegiatan pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kepulauan Masaloka Raya.....	23
Gambar 3.3 Kegiatan pembangunan jaringan irigasi permukaan pada tahun 2021	28
Gambar 3.4 Kegiatan pemeliharaan jaringan irigasi tahun 2021	29
Gambar 3.5 Kegiatan pembangunan dan penataan kawasan permukiman dan kawasan strategis kabupaten tahun 2021	32

BAB I PENDAHULUAN

1. 1. LATAR BELAKANG

Dalam rangka terselenggaranya *good governance* diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggung jawaban yang tepat, jelas, terukur, dan sah sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara diwajibkan untuk mempertanggung jawab kan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan suatu perencanaan strategis yang ditetapkan oleh masing-masing instansi. Pertanggung jawaban dimaksud berupa laporan yang disampaikan kepada atasan masing-masing, lembaga-lembaga pengawasan dan penilai akuntabilitas, yang akhirnya disampaikan kepada Presiden selaku kepala pemerintahan. Laporan tersebut menggambarkan pencapaian kinerja instansi pemerintah yang bersangkutan melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 tahun 2010 tentang Panduan Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dinyatakan bahwa Satuan Kerja Pemerintah Daerah dan unit kerja mandiri Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota harus menyusun penetapan kinerja setelah menerima dokumen pelaksanaan anggaran dan ditandatangani oleh Gubernur dan Bupati/Walikota dan pimpinan SKPD.

1. 2. TUGAS DAN FUNGSI

Dinas Pekerjaan Umum dan Pekerjaan Umum Kabupaten Bombana sebagai salah satu instansi/unit kerja di Pemerintah Kabupaten Bombana yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas setingkat Eselon I/b yang dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati. Secara umum tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Pekerjaan Umum Kabupaten Bombana sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bupati Bombana Nomor 36 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bombana.

Adapun tugas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bombana adalah membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

Dalam menyelenggarakan tugas tersebut, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bombana menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- d. Ruang:
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang: dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan
- g. fungsi dinas.

1. 3. STRUKTUR ORGANISASI

Struktur organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bombana berdasarkan Peraturan Bupati Bombana Nomor 36 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bombana, terdiri atas :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat;
- c. Bidang Bina Marga;
- d. Bidang Pengairan;
- e. Bidang Cipta Karya;
- f. Bidang Penataan Ruang;
- g. Bidang Pengawasan dan Pengendalian;
- h. Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
- i. Kelompok Jabatan Fungsional.

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan pelayanan administrasi kepada seluruh perangkat lingkup dinas meliputi urusan perlengkapan, keuangan, kepegawaian dan penyusunan program. Sekretariat terdiri atas 3 (tiga) sub bagian, yaitu :

- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b. Sub Bagian Perencanaan; dan
- c. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan.

Bidang Bina Marga mempunyai tugas melaksanakan serta menyiapkan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, bidang Bina Marga meliputi perencanaan, pembangunan dan pemeliharaan prasarana jalan dan jembatan berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati dan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bidang Bina Marga terdiri atas 3 (tiga) seksi, yaitu

- a. Seksi Pembangunan Jalan;
- b. Seksi Pembangunan Jembatan; dan
- c. Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan.

Bidang Pengairan mempunyai tugas melaksanakan dan menyiapkan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dalam Bidang Pengairan meliputi survei, pengukuran, pemotretan, penyusunan laporan pelaksanaan pengukuran lapangan, rehabilitasi, pengembangan dan pemeliharaan serta pelaksanaan sebagian tugas di Bidang Pengairan dan pengelolaan sumber daya air Bidang Pengairan terdiri atas 3 (tiga) seksi, yaitu

- a. Seksi Bangunan dan Bina Manfaat;
- b. Seksi Operasi dan Pemeliharaan; dan
- c. Seksi Penanganan sungai pantai dan rawa.

Bidang Cipta Karya mempunyai tugas menyiapkan Bahan perumusan kebijakan dan koordinasi di bidang Cipta Karya meliputi perencanaan di bidang program pengembangan wilayah pemukiman dan penataan pembangunan. Bidang Cipta terdiri atas 3 (tiga) seksi, yaitu :

- a. Seksi Seksi Air Minum dan Air Bersih;
- b. Seksi Seksi Permukiman. Penyehatan Lingkungan; dan
- c. Seksi Bangunan Gedung. Penataan Bangunan dan Lingkungan.

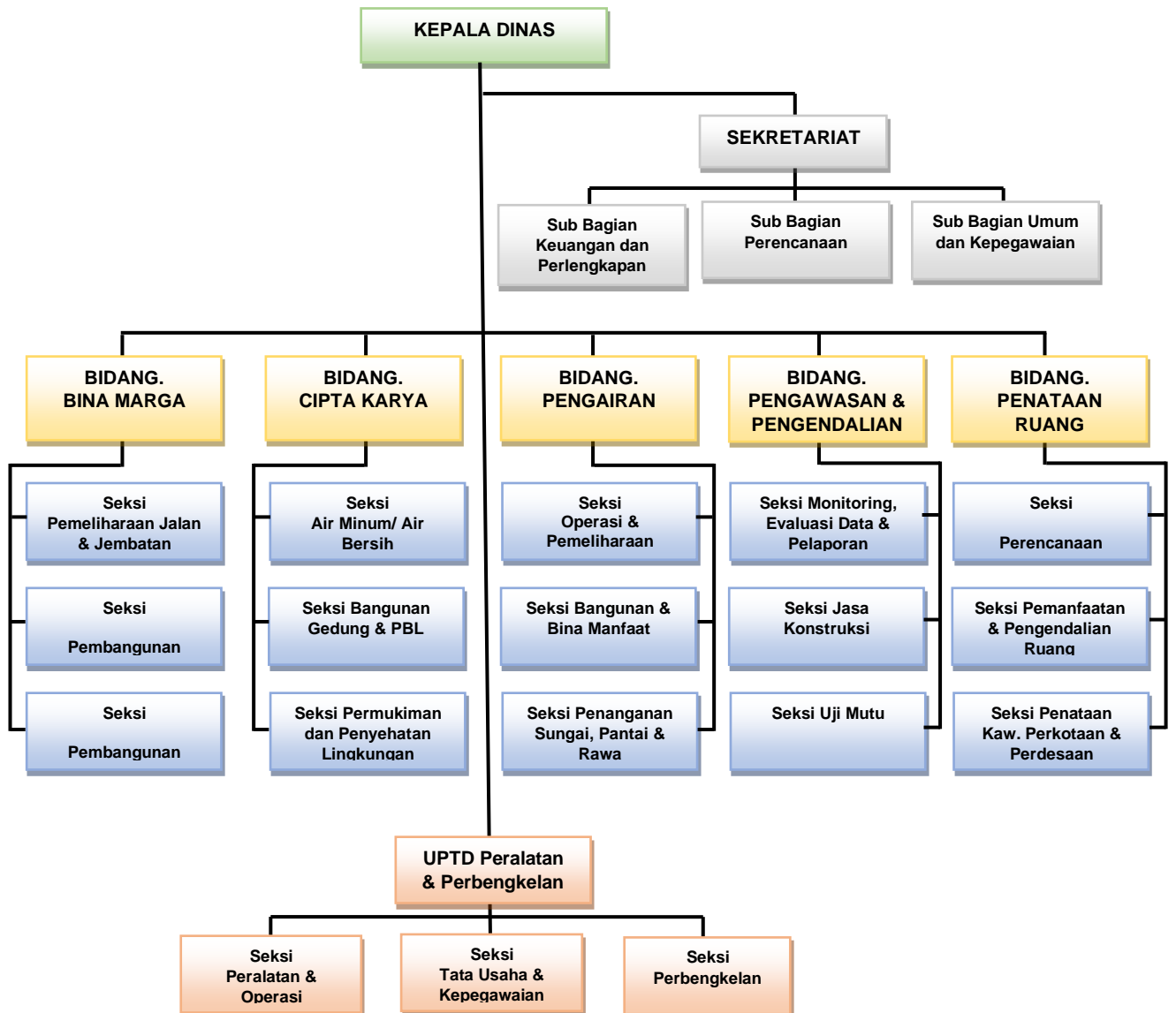
Bidang Penataan Ruang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang di bidang penataan ruang dan pengembangan penataan bangunan. Bidang Penataan Ruang terdiri atas 3 (tiga) seksi, yaitu:

- a. Seksi Perencanaan Ruang;
- b. Seksi Pemanfaatan dan Pengendalian Ruang; dan
- c. Seksi Penataan Kawasan Perkotaan dan Pedesaan.

Bidang Pengawasan dan Pengendalian mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas pekerjaan umum di bidang penataan ruang, di bidang

pengawasan dan pengendalian dan laboratorium. Bidang Pengawasan dan Pengendalian terdiri atas 3 (tiga) seksi, yaitu:

- a. Seksi Monitoring, Evaluasi Data dan Pelaporan;
- b. Seksi Jasa Konstruksi; dan
- c. Seksi Uji Mutu.



Gambar 1.1 Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bombana

Sumber : Peraturan Bupati Bombana Nomor 36 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bombana

1. 4. ASPEK STRATEGIS ORGANISASI

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bombana memiliki peran yang sangat strategis dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur wilayah, yaitu pembangunan sarana dan prasarana jalan dan jembatan, irigasi, air minum, sanitasi, penyelenggaraan bangunan dan gedung, penataan kawasan permukiman, jasa konstruksi, dan bidang penataan ruang.

1. 5. PERMASALAHAN UTAMA

Permasalahan utama yang dihadapi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bombana dalam pembangunan infrastruktur di wilayah Kabupaten Bombana masih pada keterbatasan anggaran untuk dapat menjangkau setiap wilayah desa dan kelurahan. Sedangkan kondisi infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan, irigasi, air minum, dan sanitasi pada 121 desa dan 22 kelurahan yang tersebar di 22 wilayah kecamatan masih rendah baik kualitas maupun kuantitasnya. Sehingga pembangunan infrastruktur di wilayah-wilayah tersebut dilaksanakan secara bertahap setiap tahunnya. Untuk itu penetapan lokasi prioritas pembangunan berdasarkan skala prioritas dan berdasarkan kawasan strategis kabupaten yang telah ditetapkan dalam RTRW Kabupaten Bombana Tahun 2013 – 2033 dan Perubahan RPJMD Kabupaten Bombana Tahun 2017 – 2022 serta pada Perubahan Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bombana Tahun 2017 – 2022.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2. 1. RENCANA STRATEGIS

2. 1.1. Tujuan dan Sasaran

Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bombana Tahun 2017 – 2022 telah mengalami perubahan pada tahun 2020, yang didasarkan pada perubahan RPJMD Kabupaten Bombana Tahun 2017 – 2022. Dalam dokumen perubahan RPJMD tersebut, visi dan misi Pembangunan Kabupaten Bombana Tahun 2017 - 2022 tidak mengalami perubahan, hanya terdapat penambahan penjelasan misi yang tidak ada dalam dokumen sebelumnya. Namun terdapat perubahan signifikan pada penetapan tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Bombana Tahun 2020 - 2022, sehingga dilakukan pula penyesuaian pada penetapan tujuan dan sasaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bombana Tahun 2017 – 2022.

Adapun tujuan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bombana adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatkan pemerataan layanan infrastruktur dasar;
- b. Meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi daerah;
- c. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup;

Sedangkan sasaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bombana adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatnya kualitas dan kapasitas infrastruktur jalan kabupaten dalam mendukung konektivitas wilayah;
- b. Meningkatnya akses masyarakat terhadap pelayanan air minum aman dan sanitasi layak;
- c. Meningkatnya cakupan pelayanan irigasi untuk persawahan dalam mendukung pertumbuhan PDRB pada sektor pertanian;
- d. Meningkatnya kualitas lingkungan kawasan permukiman serta kawasan strategis; dan
- e. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan penataan ruang guna mendukung peningkatan kualitas lingkungan hidup;

2. 1.2. Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bombana dalam mencapai tujuan dan sasaran tahun 2020 – 2022 adalah sebagai berikut :

- a. Mengoptimalkan kegiatan peningkatan kualitas dan kapasitas jalan dan jembatan serta preservasi jalan dan jembatan guna meningkatkan kondisi kemantapan jalan kabupaten, terutama jalan-jalan poros dan jalan strategis kabupaten;

- b. Meningkatkan cakupan pelayanan sambungan rumah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) khususnya jaringan perpipaan;
- c. Meningkatkan cakupan pelayanan Sistem Pengolahan air Limbah Domestik (SPALD) baik individual dan komunal.
- d. Meningkatkan kegiatan pembangunan, peningkatan, rehabilitasi dan pemeliharaan jaringan irigasi persawahan;
- e. Meningkatkan upaya penanggulangan banjir dan penyehatan lingkungan permukiman; dan
- f. Meningkatkan kualitas dan kuantitas perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang;

Arah kebijakan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bombana tahun 2020 – 2022 merupakan penjabaran dari kebijakan yang ditetapkan dalam revisi RPJMD Kabupaten Bombana tahun 2020 – 2022, yaitu :

- a. Peningkatan kualitas infrastruktur jalan dan jembatan lebih difokuskan pada ruas-ruas jalan poros strategis kabupaten yang menghubungkan antarwilayah kecamatan dan jalan poros strategis kecamatan yang menghubungkan antarwilayah desa;
- b. Memprioritaskan pelayanan akses air minum aman dan sanitasi layak bagi rumah tangga katagori miskin atau masyarakat berpenghasilan rendah yang belum memiliki akses terhadap air minum aman dan sanitasi layak;
- c. Kegiatan pembangunan jaringan irigasi pada persawahan potensial yang belum terlayani guna mendukung peningkatan produksi panen;
- d. Peningkatan diprioritaskan guna penanganan kawasan permukiman kumuh, rawan banjir, dan kawasan strategis; dan
- e. Peningkatan kesesuaian antara pemanfaatan ruang dengan RTRW dan RDTR.

2. 2. RENCANA KINERJA TAHUNAN

Secara umum, Rencana Kinerja Tahunan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bombana Tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut

Tabel 2.1
Rencana Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Bombana Tahun 2021

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1.	Meningkatnya kualitas dan kapasitas infrastruktur jalan kabupaten dalam mendukung konektivitas wilayah	Persentase panjang jalan kabupaten dalam kondisi mantap (kondisi baik dan sedang)	%	79
2.	Meningkatnya akses masyarakat terhadap pelayanan air minum aman dan sanitasi layak	Persentase jumlah rumah tangga yang memiliki akses air minum terlindungi	%	97
		Persentase jumlah rumah tangga yang memiliki fasilitas air limbah domestik	%	84
3.	Meningkatnya cakupan pelayanan irigasi untuk persawahan dalam mendukung pertumbuhan PDRB pada sektor pertanian	Persentase luas sawah yang mendapat layanan irigasi	%	69
4.	Meningkatnya kualitas lingkungan permukiman serta kawasan strategis kabupaten	Jumlah kawasan permukiman dan kawasan strategis kabupaten yang ditingkatkan kualitas lingkungannya	kawasan	59
5.	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan penataan ruang guna mendukung peningkatan kualitas lingkungan hidup	Persentase kesesuaian antara pemanfaatan ruang wilayah kabupaten dengan RTRW kabupaten	%	85
6.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bombana	Hasil Evaluasi SAKIP Dinas PUPR oleh Inspektorat	Nilai	BB

2. 3. PENETAPAN KINERJA

Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Sasaran strategis, indikator kinerja, dan target tahun 2021 dapat dilihat pada tabel 2.2. berikut:

Tabel 2.2
Penetapan Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bombana Tahun 2021

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp.)
1.	Meningkatnya kualitas dan kapasitas infrastruktur jalan kabupaten dalam mendukung konektivitas wilayah	Persentase panjang jalan kabupaten dalam kondisi mantap (kondisi baik dan sedang)	79%	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	89.682.050.375
				<i>Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota</i>	89.682.050.375
				1. Survei Kondisi Jalan/Jembatan	711.430.000
				2. Rekonstruksi Jalan	79.221.576.175
				3. Rehabilitasi Jalan	6.526.550.000
				4. Pembangunan Jembatan	897.464.200
				5. Penggantian Jembatan	2.025.030.000
6. Rehabilitasi Jembatan	300.000.000				
2.	Meningkatnya akses masyarakat terhadap pelayanan air minum aman dan sanitasi layak	Persentase jumlah rumah tangga yang memiliki akses air minum terlindungi	97%	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	5.886.140.300
				<i>Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota</i>	5.886.140.300
				1. Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	416.000.000
				2. Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	5.470.140.300
		Persentase jumlah rumah tangga yang memiliki fasilitas air limbah domestik	84%	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	1.555.555.000
				<i>Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota</i>	1.555.555.000
				1. Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	1.445.915.000
2. Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	109.640.000				
3.	Meningkatnya cakupan pelayanan irigasi untuk persawahan dalam mendukung pertumbuhan PDRB pada sektor pertanian	Persentase luas sawah yang mendapat layanan irigasi	69%	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	5.946.805.094
				<i>Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</i>	5.946.805.094
				1. Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan	2.030.960.000
				2. Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	3.326.393.080
				3. Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	300.000.000
4. Operasional Unit Pengelola Irigasi	289.452.014				
4.	Meningkatnya kualitas lingkungan permukiman serta kawasan strategis kabupaten	Jumlah kawasan permukiman dan kawasan strategis kabupaten yang ditingkatkan kualitas lingkungannya	59 kawasan	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	2.476.500.000
				<i>Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</i>	2.476.500.000
				1. Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing	2.476.500.000

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp.)
				Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	245.395.000
				<i>Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota</i>	245.395.000
				1. Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	245.395.000
				Program Pengembangan Permukiman	15.258.000.000
				<i>Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota</i>	15.258.000.000
				1. Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	5.258.000.000
				Program Penataan Bangunan Gedung	5.962.788.057
				<i>Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung</i>	5.962.788.057
				1. Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	132.613.057
				2. Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	5.830.175.000
				Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	6.563.160.000
				<i>Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota</i>	6.563.160.000
				1. Penataan Bangunan dan Lingkungan	6.563.160.000
5.	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan penataan ruang guna mendukung peningkatan kualitas lingkungan hidup	Persentase kesesuaian antara pemanfaatan ruang wilayah kabupaten dengan RTRW kabupaten	85%	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	82.597.831
				<i>Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah</i>	82.597.831
				1. Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang	82.597.831
6.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bombana	Hasil Evaluasi SAKIP Dinas PUPR oleh Inspektorat	BB	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	8.812.429.659
				<i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	307.664.974
				1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	127.350.730
				2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	11.742.987
				3. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	6.673.442
				4. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	161.897.815
				<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	4.945.878.146
				1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.671.499.656
				2. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	243.107.821
				3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	9.719.364
				4. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	21.551.305

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp.)
				<i>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</i>	41.926.033
				1. Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	14.400.000
				2. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	27.526.033
				<i>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i>	84.500.000
				1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	59.500.000
				2. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	25.000.000
				<i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	758.782.506
				1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.992.038
				2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	16.400.000
				3. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	50.932.572
				4. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	10.356.096
				5. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	16.800.000
				6. Fasilitasi Kunjungan Tamu	12.000.000
				7. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	561.701.800
				8. Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	87.600.000
				<i>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	2.355.000.000
				1. Pengadaan Alat Besar	2.355.000.000
				<i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	139.968.000
				1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	288.000
				2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	92.280.000
				3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	47.400.000
				<i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	178.710.000
				1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	82.500.000
				2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	30.000.000
				3. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	6.420.000
				4. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	56.790.000
				5. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
				Program Pengembangan Jasa Konstruksi	61.125.867
				<i>Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi</i>	61.125.867
				Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	61.125.867
TOTAL ANGGARAN					160.450.336.650

BAB III

AKUTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik.

Adapun indikator sasaran pelaksanaan akuntabilitas kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bombana Tahun 2021, yaitu :

- 1) Meningkatnya kualitas dan kapasitas infrastruktur jalan kabupaten dalam mendukung konektivitas wilayah, dengan indikator sasaran persentase panjang jalan kabupaten dalam kondisi mantap (kondisi baik dan sedang);
- 2) Meningkatnya akses masyarakat terhadap pelayanan air minum aman dan sanitasi layak, yang terdiri atas 2 (dua) indikator sasaran, yaitu :
 - a) Persentase jumlah rumah tangga yang memiliki akses air minum terlindungi; dan
 - b) Persentase jumlah rumah tangga yang memiliki fasilitas air limbah domestik.
- 3) Meningkatnya cakupan pelayanan irigasi untuk persawahan dalam mendukung pertumbuhan PDRB pada sektor pertanian dengan indikator sasaran persentase luas sawah yang mendapat layanan irigasi; dan
- 4) Meningkatnya kualitas lingkungan permukiman serta kawasan strategis kabupaten, dengan indikator sasaran jumlah kawasan permukiman dan kawasan strategis yang ditingkatkan kualitas lingkungannya; dan
- 5) Meningkatnya kualitas penyelenggaraan penataan ruang guna mendukung peningkatan kualitas lingkungan hidup, dengan indikator sasaran persentase kesesuaian antara pemanfaatan ruang wilayah kabupaten dengan RTRW Kabupaten Bombana.

Akuntabilitas kinerja ini juga menyajikan penjelasan tentang deviasi antara realisasi kegiatan dengan rencana serta keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, dalam pencapaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah diperlukan pola pengukuran kinerja atas kegiatan, program dan kebijakan yang dilakukan dalam rangka pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

3.1. PENGUKURAN KINERJA

Evaluasi Kinerja dilakukan dengan cara menghitung pengukuran kinerja dari pelaksanaan program/kegiatan yang telah ditetapkan. Dalam pengukuran evaluasi kinerja, selain dari aspek keuangan juga dikaji melalui aspek ekonomis, efisiensi dan efektivitas evaluasi yang dilaksanakan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bombana.

Hasil evaluasi kinerja yang diperoleh dengan cara menghitung pengukuran capaian kinerja dari pelaksanaan program/kegiatan yang telah ditetapkan. Untuk memudahkan dalam hal pemantauan kinerja SKPD dibantu dengan tabel skala nilai yang ditunjukkan pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.1
Skala Pengukuran Capaian Kinerja

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja (%)	Kategori Capaian
1.	$91 \leq 100$	Sangat Baik
2.	$76 \leq 90$	Baik
3.	$66 \leq 75$	Sedang
4.	$51 \leq 65$	Rendah
5.	≤ 50	Sangat Rendah

Pengukuran capaian kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bombana Tahun 2021 dilakukan dengan membandingkan antara target capaian dengan realisasi capaian kinerja sasaran strategis tahun 2021 berdasarkan indikator kinerja sebagai tolok ukur keberhasilan capaian, sebagaimana diuraikan pada tabel berikut ini :

Tabel 3.2
Pengukuran Capaian Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bombana Tahun 2021

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Kinerja Awal (2018)	Capaian Kinerja Tahun 2021			Target Akhir Renstra (2022)
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian	
1.	Meningkatnya kualitas dan kapasitas infrastruktur jalan kabupaten dalam mendukung konektivitas wilayah	Persentase panjang jalan kabupaten dalam kondisi mantap (kondisi baik dan sedang)	%	75	79	79,59	100,7%	80
2.	Meningkatnya akses masyarakat terhadap pelayanan air minum aman dan sanitasi layak	Persentase jumlah rumah tangga yang memiliki sumber air minum terlindungi	%	90	97	91,18	94%	99
		Persentase jumlah rumah tangga yang memiliki fasilitas air limbah domestik	%	63	84	82,01	97,6%	90
3.	Meningkatnya cakupan pelayanan irigasi untuk persawahan dalam mendukung pertumbuhan PDRB pada sektor pertanian	Persentase luas sawah yang mendapat layanan irigasi	%	66	69	70,90	102,7%	70
4.	Meningkatnya kualitas lingkungan permukiman serta kawasan strategis kabupaten	Jumlah kumulatif kawasan permukiman dan kawasan strategis yang ditingkatkan kualitas lingkungannya	Kawasan	26	59	61	103%	72

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Kinerja Awal (2018)	Capaian Kinerja Tahun 2021			Target Akhir Renstra (2022)
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian	
5.	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan penataan ruang guna mendukung peningkatan kualitas lingkungan hidup	Persentase kesesuaian antara pemanfaatan ruang wilayah kabupaten dengan RTRW kabupaten	%	80	85	76	91,8%	90
6.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bombana	Hasil Evaluasi SAKIP Dinas PUPR oleh Inspektorat	Nilai	CC	BB	?	?	A

3. 2. ANALISA CAPAIAN KINERJA

3.2.1. Capaian Kinerja Sasaran 1

Untuk mengukur pencapaian kinerja pada sasaran 1 yaitu meningkatnya kualitas dan kapasitas infrastruktur jalan kabupaten dalam mendukung konektivitas wilayah, indikator yang digunakan adalah persentase panjang jalan kabupaten dalam kondisi mantap. Berdasarkan standar dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, yang dimaksud dengan jalan dalam kondisi mantap adalah jalan yang dalam kondisi baik dan kondisi sedang. Sedangkan jalan kabupaten yang dimaksud adalah ruas-ruas jalan yang masuk dalam status jalan kabupaten sebagaimana yang terdaftar dalam Keputusan Bupati Bombana Nomor 295 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Bombana Nomor 136 Tahun 2014 tentang Penetapan Ruas-Ruas Jalan Menurut Statusnya Sebagai Jalan Kabupaten dan Jalan Desa di Kabupaten Bombana, di mana total panjang jalan kabupaten adalah 790,03 Km.

Berdasarkan hasil survei kondisi jalan dan jembatan yang dilaksanakan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bombana pada tahun 2021, persentase panjang jalan kabupaten yang dalam kondisi mantap pada tahun 2021 mencapai 79,59%. Capaian tersebut telah berhasil melampaui target kinerja tahun 2021 yang telah ditetapkan dalam Perubahan Renstra Tahun 2017 – 2022 yaitu sebesar 79%, dengan tingkat capaian 100,7% dan kategori capaian sangat baik.

Tabel 3.3
Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran 1

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Tingkat Capaian	Kategori Capaian
1.	Meningkatnya kualitas dan kapasitas infrastruktur jalan kabupaten dalam mendukung konektivitas wilayah	Persentase panjang jalan kabupaten dalam kondisi mantap (kondisi baik dan sedang)	%	79	79,59	100,7%	Sangat Baik

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bombana, Survei Kondisi Jalan Kabupaten Bombana Tahun Anggaran 2021

Dari total panjang jalan kabupaten yaitu 790,03 Km, panjang jalan kabupaten yang dalam kondisi mantap pada tahun 2021 adalah 628,81 Km (79,59%) dan masih didominasi dengan jalan dalam kondisi sedang, dengan rincian sebagai berikut :

1. Jalan dengan kondisi baik sepanjang 191,79 Km (24,28%);
2. Jalan dengan kondisi sedang sepanjang 437,03 Km (55,32%).

Sedangkan panjang jalan kabupaten yang tidak dalam kondisi mantap pada tahun 2021 adalah 161,22 Km (20,41%), yang terdiri atas :

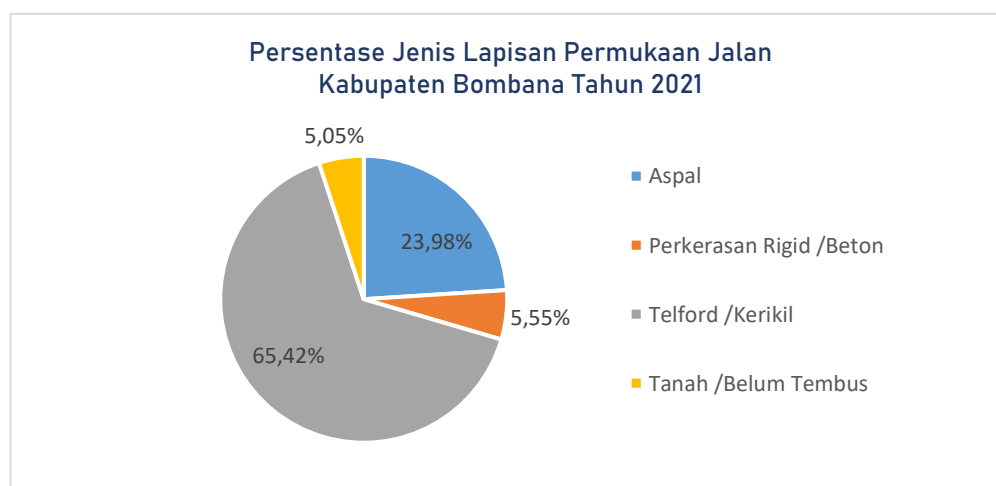
1. Jalan dengan kondisi rusak ringan sepanjang 73,44 Km (9,30%);
2. Jalan dengan kondisi rusak berat sepanjang 87,77 Km (11,11%).



Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bombana, Survei Kondisi Jalan Kabupaten Bombana Tahun Anggaran 2021

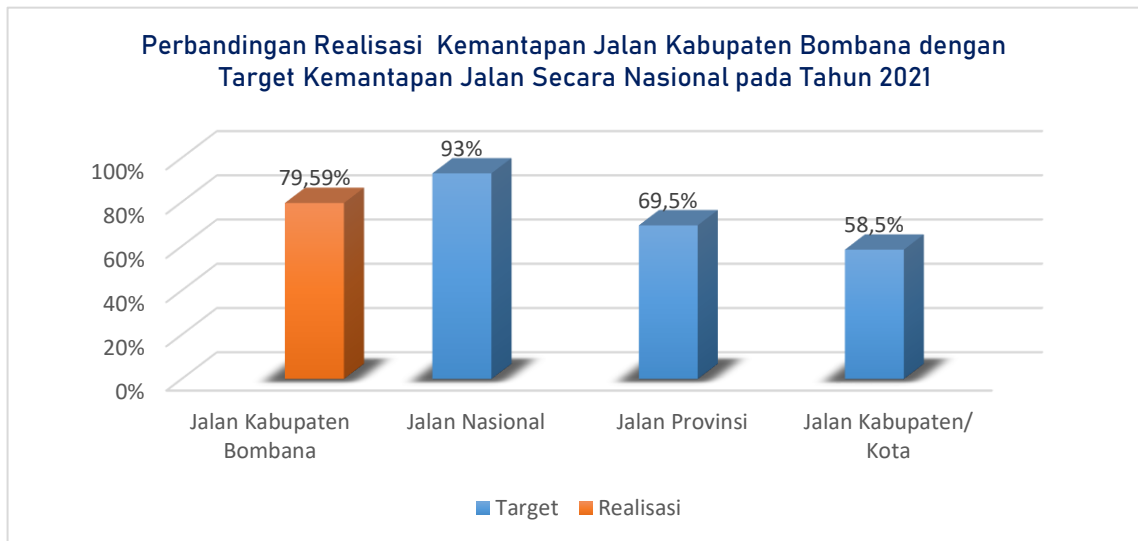
Berdasarkan jenis lapisan permukaannya, kondisi jalan kabupaten Bombana pada tahun 2021 masih didominasi jalan dengan lapisan telford//kerikil/urpil yaitu sebesar 67,10%, dengan rincian sebagai berikut :

1. Lapisan aspal sepanjang 202,987 Km (25,69%);
2. Lapisan rigid beton sepanjang 14,042 Km (1,78%);
3. Lapisan telford/kerikil/urpil sepanjang 530,10 Km (67,10%); dan
4. Lapisan tanah/belum tembus sepanjang 42,90 Km (5,43%).

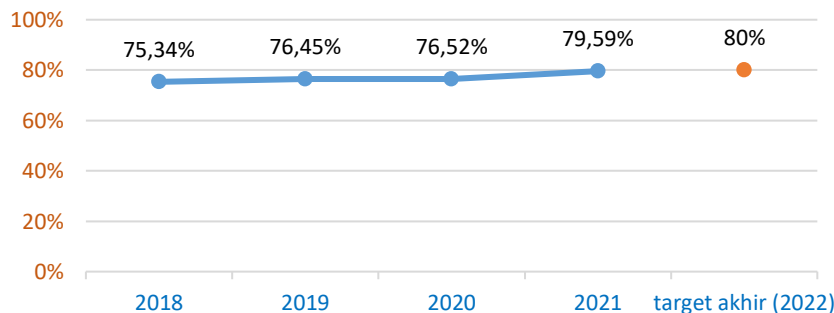


Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bombana, Survei Kondisi Jalan Kabupaten Bombana Tahun Anggaran 2021

Bila dibandingkan dengan target tingkat kemantapan jalan secara nasional pada RPJMN 2020 - 2024, target peningkatan kemantapan jalan secara nasional pada tahun 2021 adalah 93% untuk kemantapan jalan nasional, 69,5% untuk jalan provinsi, dan 58,5% untuk jalan kabupaten/kota. Tingkat kemantapan jalan Kabupaten Bombana yang mencapai 79,59% lebih tinggi dibandingkan dengan target rata-rata tingkat kemantapan jalan kabupaten/kota secara nasional yang baru mencapai 58,5%, namun jauh lebih rendah dibandingkan dengan target kemantapan jalan nasional yang telah mencapai 93%.



Realisasi tingkat kemantapan jalan kabupaten terus mengalami peningkatan tiap tahunnya. Pada tahun 2018, tingkat kemantapan jalan kabupaten baru mencapai 75,34%, kemudian meningkat cukup signifikan menjadi 76,45% pada tahun 2019, meskipun peningkatannya cukup kecil menjadi 76,52% pada tahun 2020. Dan pada tahun 2021 kembali mengalami peningkatan yang signifikan menjadi 79,59%. Realisasi pada tahun 2021 telah hampir mencapai target akhir periode pada tahun 2022 yaitu sebesar 80%, sehingga dibutuhkan peningkatan 0,41% lagi di tahun 2022 untuk



Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bombana, Survei Kondisi Jalan Kabupaten Bombana Tahun Anggaran 2021

Pada tahun 2021, total panjang jalan kabupaten yang ditangani oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bombana mencapai 105,45 Km, dengan rincian penanganan sebagai berikut :

1. Rekonstruksi/peningkatan struktur jalan sepanjang 22,82 Km.

Tabel 3.4
Pekerjaan Rekonstruksi Jalan Kabupaten tahun 2021

No.	Nama Paket Pekerjaan	Volume (Km)	Sumber Anggaran	Keterangan
1.	Peningkatan Jalan Kasipute - Lora - Bambiaea	4,62	Dana Pinjaman Daerah	
2.	Peningkatan Jalan Dongkala - Sikeli - Pongkalaero	3,63		
3.	Peningkatan Jalan Toari- Balasari - Tetehaka	2,29		
4.	Peningkatan Jalan Matausu	1,45		
5.	Peningkatan Jalan Sikeli - Dongkala	2,36	DAK	
6.	Peningkatan Jalan Tedubara-Pising	2,37	DAK	
7.	Peningkatan Jalan Strategis Desa Jalan Lingkar Pulau Masaloka	2,5	DAK	
8.	Peningkatan Jalan Strategis Desa Jalan Wisata TTP - Laponuponu - Pulau Kondo	4,25	DAK	
9.	Peningkatan jalan Aneka Marga	0,77	DAU	
10.	Peningkatan jalan Batu Putih	0,64	DAU	
11.	Peningkatan jalan Biru - Tampabulu - Tontonunu	2,66	DAU	
12.	Peningkatan Jalan Lantari - Tinabite	2,28	DAU	
13.	Peningkatan Jalan Lantawonua	1,26	DAU	
14.	Pengaspalan jalan Teppo - Biru - Tampabulu		DAU	
15.	Peningkatan Jalan Lingkungan Desa Waemputtang		DAU	
16.	Pembangunan talud jalan Desa Tembe		DAU	



Gambar 3.1 Kegiatan rekonstruksi jalan kabupaten dengan aspal dan rigid beton

2. Pemeliharaan/rehabilitasi jalan berkala sepanjang 82,63 Km dengan penanganan dilaksanakan pada 21 ruas jalan yang tersebar di hamper seluruh wilayah kecamatan. Pada tahun 2021, panjang jalan yang dipelihara meningkat drastis dibanding dengan capaian tahun-tahun sebelumnya. Hal ini merupakan respon atas rekomendasi hasil evaluasi tahun-tahun sebelumnya, sehingga pada tahun 2021 anggaran untuk kegiatan pemeliharaan/rehabilitasi jalan berkala ditingkatkan secara signifikan.



Gambar 3.2 Kegiatan pemeliharaan/rehabilitasi jalan kabupaten untuk pengembalian kondisi jalan dengan patcing asphalt, layering asphalt, dan perkerasan

3. Pembangunan jembatan sebanyak 1 unit, yaitu pembangunan jembatan di Kelurahan Kastarib.



Gambar 3.3 Kegiatan pembangunan jembatan di Kelurahan Kastarib

4. Penggantian jembatan sebanyak 4 unit, yaitu : penggantian dan renovasi jembatan gantung di Desa Pasareapua, penggantian dan renovasi jembatan gantung di Desa

Rompu-rompu, penggantian jembatan di jalan poros Mulaeno – Toburi, penggantian jembatan di Sungai Pangkuri.



Gambar 3.4 Kegiatan penggantian jembatan gantung

5. Pemeliharaan dan rehabilitasi jembatan sebanyak 3 unit, yaitu jembatan di Desa Lora, di Desa Lemo dan di Desa Sangia Makmur.



Gambar 3.5 Kegiatan pemeliharaan dan rehabilitasi jembatan

Dalam mendukung pencapaian target sasaran 1, terdapat 1 program dan 1 kegiatan dan 6 sub kegiatan yang dianggarkan dalam DPA Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bombana T.A 2021 yaitu sebagai berikut :

Tabel 3.5
Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Penunjang Pencapaian Sasaran 1

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Bidang Penanggung Jawab
A.	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	89.682.050.375	Bina Marga
A.1	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	89.682.050.375	
1.	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	711.430.000	
2.	Rekonstruksi Jalan	79.221.576.175	
3.	Rehabilitasi Jalan	6.526.550.000	
4.	Pembangunan Jembatan	897.464.200	
5.	Penggantian Jembatan	2.025.030.000	
6.	Rehabilitasi Jembatan	300.000.000	

3.2.2. Capaian Kinerja Sasaran 2

Untuk dapat mengukur pencapaian kinerja pada sasaran 2 yaitu meningkatnya akses masyarakat terhadap akses air minum dan sanitasi layak, maka digunakan 2 indikator, yaitu

1. Persentase jumlah rumah tangga yang memiliki sumber air minum terlindungi; dan
2. Persentase jumlah rumah tangga yang memiliki fasilitas air limbah domestik.

a. Akses Sumber Air Minum Terlindungi

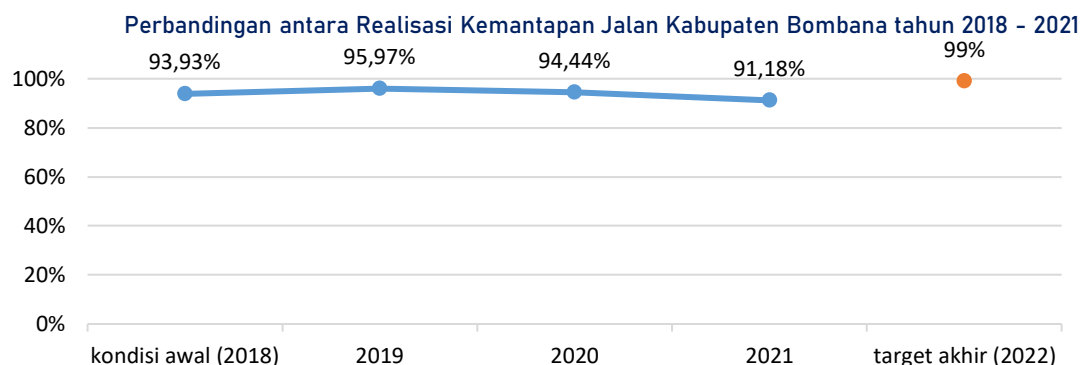
Berdasarkan data hasil Susenas BPS Kabupaten Bombana tahun 2021 dalam Statistik Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Bombana Tahun 2021, persentase jumlah rumah tangga di Kabupaten Bombana yang telah mendapatkan sumber air minum terlindungi adalah 91,18%. Realisasi ini tidak mencapai target yang telah ditetapkan pada tahun 2021 yaitu sebesar 97%, dengan tingkat capaian 94% dan kategori capaian sangat baik.

Tabel 3.6
Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran 1

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Tingkat Capaian	Kategori Capaian
2.	Meningkatnya akses masyarakat terhadap pelayanan air minum aman dan sanitasi layak	Persentase jumlah rumah tangga yang memiliki sumber air minum terlindungi	%	97	91,18	94%	Sangat Baik

Sumber : BPS Kabupaten Bombana, Statistik Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Bombana tahun 2021 dan hasil analisa

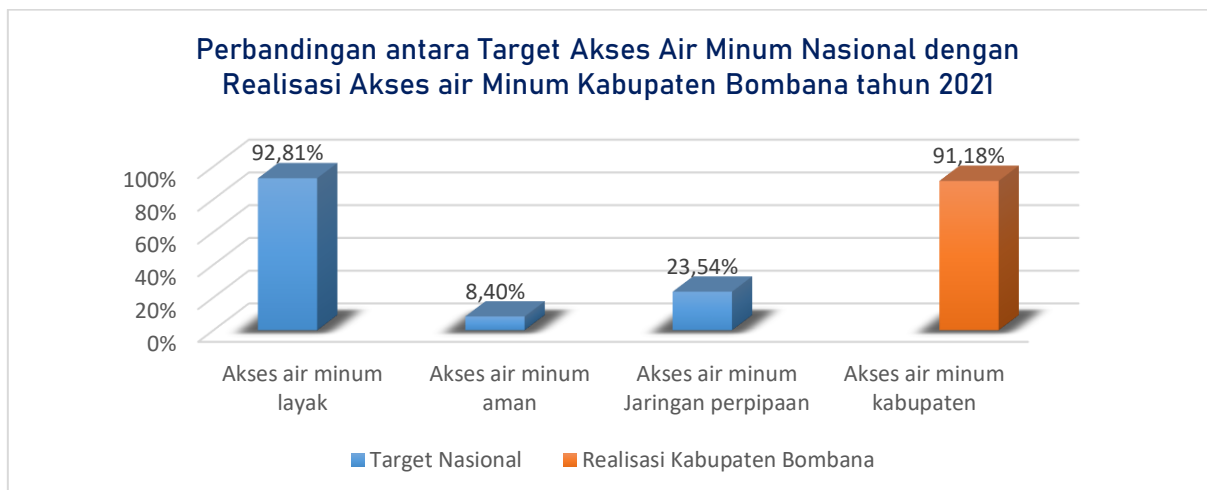
Jika membandingkan antara realisasi pelayanan rumah tangga yang telah mendapatkan akses sumber air minum terlindungi dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2021, terjadi tren penurunan capaian sejak tahun 2020 hingga tahun 2021, di mana pada tahun 2020 realisasinya turun menjadi 95,97% dan terus mengalami penurunan menjadi 94,44% pada tahun 2021. Peningkatan hanya terjadi pada tahun 2019, yang merupakan capaian tertinggi selama empat tahun ini yaitu naik dari 93,93% pada tahun 2018 menjadi 95,97% pada tahun 2019. Untuk mencapai target akhir periode pada tahun 2022 diperlukan peningkatan sebesar 7,82%.



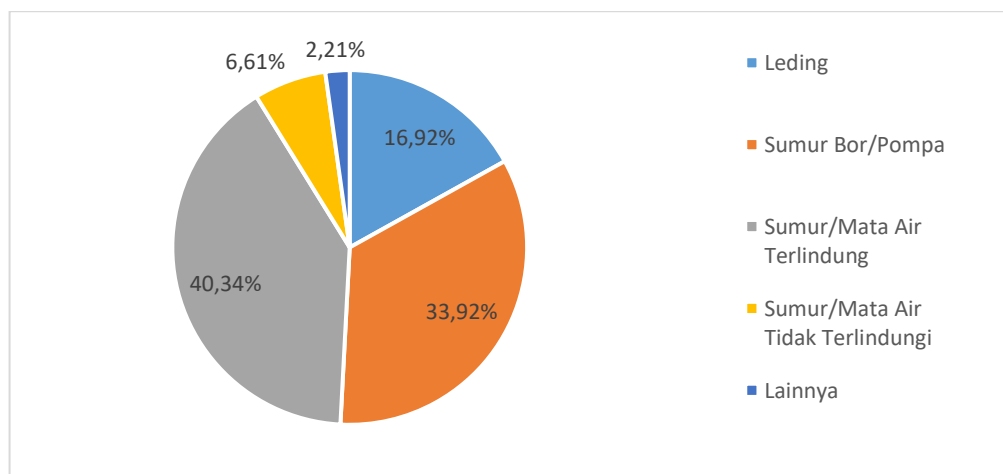
Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bombana, analisa

Tren penurunan capaian ini perlu dijadikan perhatian serius dan dilakukan evaluasi, sehingga dapat segera ditemukan solusi untuk dapat meningkatkan kembali capaian kinerja di tahun-tahun berikutnya.

Realisasi akses air minum layak di Kabupaten Bombana pada tahun 2021 sebesar 91,18% tidak tarlampau jauh dengan target akses air minum secara nasional pada tahun 2021 berdasarkan RPJMN Tahun 2020 – 2024 yaitu sebesar 92,81%. Namun dalam target RPJMN tersebut, target akses air minum terdiri atas 3 (tiga) yaitu target akses air minum layak sebesar 92,81%, target akses air minum aman sebesar 8,40% dan target akses air minum melalui jaringan perpipaan sebesar 23,54%.



Jika dilihat persentase jenis sumber air minum yang terlindungi pada rumah tangga di Kabupaten Bombana tahun 2021, penggunaan sumur/mata air terlindungi masih mendominasi sebesar 40,34% yang disusul oleh penggunaan sumur bor/pompa sebesar 33,92%. Sedangkan penggunaan leding merupakan persentase yang terkecil yaitu sebesar 16,92%. Adapun persentase sumber air minum yang tidak terlindungi sebesar 8,82% terdiri atas 6,61% sumur/mata air tidak terlindungi dan 2,21% sumber lainnya. Sumber lainnya termasuk air permukaan (sungai, danau, waduk, kolam, dan irigasi), air hujan, dan lain-lain. Persentase jenis sumber air minum utama rumah tangga di Kabupaten Bombana pada tahun 2021 dapat dilihat pada diagram berikut :



Sumber : BPS Kabupaten Bombana, Statistik Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Bombana tahun 2021

Dalam penyediaan air minum bagi masyarakat, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang selalu bersinergi dengan berbagai pihak mulai PDAM Bombana, Pemerintah Kecamatan, Pemerintah Desa, dan Kelompok Pelaksana Sistem Penyediaan Air Minum (KP-SPAM). Sinergitas dengan PDAM Bombana melalui pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum Jaringan Perpipaan di Ibukota Kecamatan (SPAM IKK). Pada tahun 2021 PDAM telah melayani pelanggan sebanyak 7.237 rumah.

Pada tahun 2021 telah dilaksanakan pembangunan baru 2 unit SPAM Jaringan Perpipaan di Kecamatan Kepulauan Masaloka Raya yang melayani 400 Sambungan Rumah (SR) dan di Desa Tembe yang melayani 100 SR baru. Khusus untuk pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kepulauan Masaloka Raya menjadi suatu terobosan baru Pemerintah Kabupaten Bombana melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam pelayanan penyediaan air minum layak bagi masyarakat di wilayah rawan air minum, khususnya di wilayah pulau. Kegiatan yang bersumber dari DAK Bidang Air Minum Tahun Anggaran 2021 telah berhasil menyediakan akses air minum layak melalui jaringan perpipaan bagi masyarakat di Pulau Masaloka yang selama ini tidak pernah mendapatkannya, karena tidak adanya sumber air minum yang layak di wilayah pulau tersebut. Terobosan baru tersebut adalah dengan menyeberangkan air dari wilayah daratan yang bersumber dari mata air permukaan di Desa Lampata Kecamatan Rumbia Tengah ke wilayah pulau Masaloka dengan menggunakan jaringan perpipaan HDPE yang melintasi perairan selat Masaloka sepanjang kurang lebih 800 meter dan kedalaman rata-rata 80 meter.



Gambar 3.2 Kegiatan pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kepulauan Masaloka Raya

Sedangkan untuk SPAM Jaringan Perpipaan yang ditingkatkan adalah di Desa Lantawonua dengan pelayanan sambungan rumah baru sebanyak 182 SR dan di Desa Watu-watu yang melayani 25 SR baru. Sedangkan untuk pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan melalui Program PAMSIMAS dilaksanakan di 4 (empat) desa dengan jumlah pelayanan sambungan rumah 300 SR. Sehingga pada tahun 2021 jumlah sambungan rumah baru yang disediakan oleh pemerintah baik melalui Pemerintah Kabupaten Bombana maupun melalui Pemerintah Pusat mencapai 1.207 SR baru. Jumlah ini menurun dibandingkan dengan tahun 2019 yang mencapai 2.000 SR dan tahun 2020 yang mencapai 1.867 SR. Sehingga bisa diduga adanya korelasi

antara tren penurunan jumlah SR baru dari tahun 2019 hingga tahun 2021 dengan tren penurunan capaian jumlah rumah tangga yang mendapatkan layanan sumber air minum terlindungi antara tahun 2019 hingga tahun 2021.



Gambar 3.8 Kegiatan peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Desa Lantawonua dan di Desa Tembe

b. Akses Fasilitas Air Limbah Domestik Layak

Berdasarkan data Susenas BPS Kabupaten Bombana dalam Statistik Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Bombana Tahun 2021, persentase jumlah rumah tangga di Kabupaten Bombana di tahun 2021 yang telah memiliki fasilitas air limbah domestik adalah 82,01%. Sedangkan 17,99% rumah tangga masih menggunakan fasilitas bersama (komunal) atau bahkan belum memiliki fasilitas buang air besar, sehingga termasuk dalam kategori Buang Air Besar Sembarang (BABS). Untuk rumah tangga yang telah menggunakan fasilitas air limbah domestik baik untuk penggunaan sendiri maupun bersama (komunal), sebanyak 93,70% telah menggunakan tangki septik (*septic tank*) dan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL/SPAL) untuk tempat pembuangan akhir tinja.

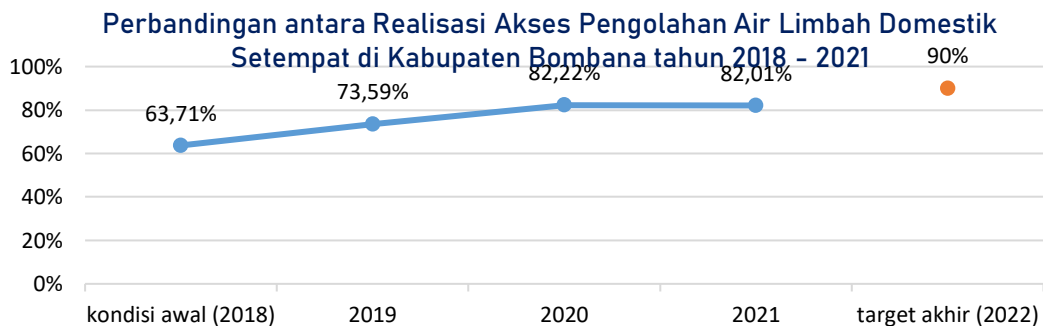
Realisasi kinerja tersebut tidak mencapai target yang telah ditetapkan pada tahun 2021 yaitu sebesar 84%, meskipun tingkat capaian keberhasilan masih tinggi yaitu 97,6% dan kategori capaian sangat baik.

Tabel 3.7
Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran 1

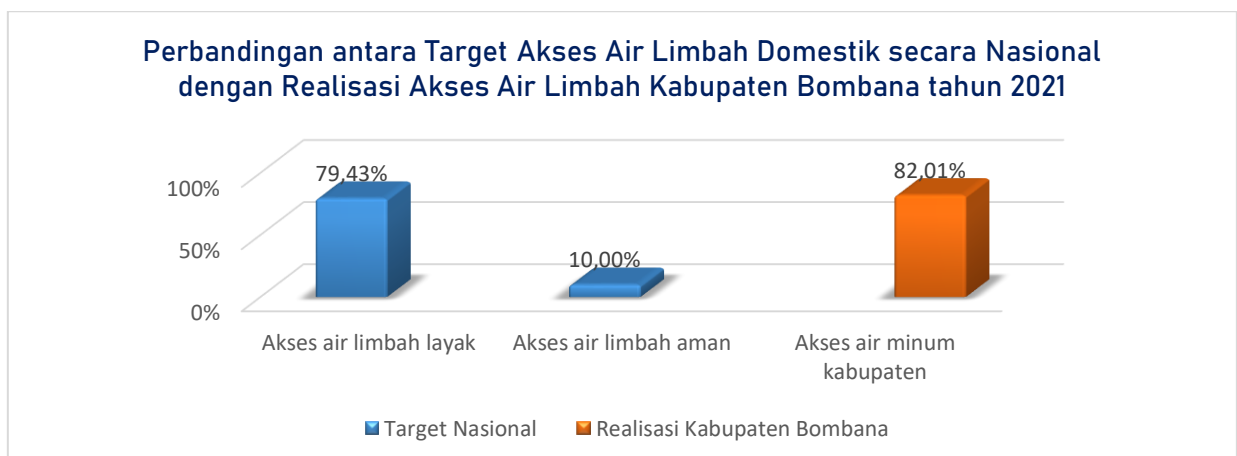
No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Tingkat Capaian	Kategori Capaian
2..	Meningkatnya akses masyarakat terhadap pelayanan air minum aman dan sanitasi layak	Persentase jumlah rumah tangga yang memiliki fasilitas air limbah domestik	%	84	82,01	97,6%	Sangat Baik

Sumber : BPS Kabupaten Bombana, Statistik Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Bombana tahun 2021 dan hasil analisa

Realisasi tingkat persentase jumlah rumah tangga yang telah memiliki fasilitas Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) terus mengalami peningkatan secara signifikan sejak tahun 2018, di mana pada tahun 2018 baru mencapai 63,71%, kemudian meningkat menjadi 73,59% pada tahun 2019, dan terus meningkat menjadi 82,22% pada tahun 2020. Akan tetapi terjadi penurunan pada tahun 2021, meskipun kecil sekali yaitu menjadi 82,01%. Untuk mencapai target akhir periode pada tahun 2022 sebesar 90%, maka diperlukan peningkatan sebesar 7,99% pada tahun 2022.



Realisasi akses masyarakat Kabupaten Bombana pada fasilitas pengolahan air limbah domestik pada tahun 2021 yang mencapai 82,01% lebih tinggi dibandingkan dengan target secara nasional pada tahun 2021 berdasarkan RPJMN Tahun 2020 – 2024, yaitu target persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan sanitasi (air limbah domestik) layak sebesar 79,43% dan 10% untuk akses aman.



Pada tahun 2021 pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) masih difokuskan pada pembangunan SPALD Setempat (SPAD-S) yaitu berupa pembangunan tangki septik (*septic tank*) beserta bangunan toilet skala individual bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Pada tahun 2021 telah dibangun tangki septik skala individual pada 150 unit yang tersebar di 3 desa, yaitu Desa Tembe di Kecamatan Rarowatu Utara, Desa Lakomea di Kecamatan Rarowatu, dan Desa Morengke di Kecamatan Matausu, yang mana keseluruhan anggarannya bersumber dari DAK Penugasan Bidang Sanitasi. Seluruh tahapan pekerjaan pembangunannya dilaksanakan secara swakelola masyarakat melalui Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) yang dibentuk di tiap desa penerima. Diharapkan dengan melibatkan masyarakat secara aktif dari awal hingga akhir proses pekerjaan, maka masyarakat akan merasa memiliki fasilitas yang telah dibangun tersebut dan akan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dalam peningkatan perilaku hidup bersih dan perilaku tidak buang air besar sembarang.

Selain itu pada tahun 2021 telah dimulai pengoperasian Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) di Desa Lantowua Kecamatan Rarowatu Utara, yang telah rampung dibangun melalui APBN pada tahun 2019. Dengan pengoperasian IPLT ini, maka telah dimulai penyedotan lumpur tinja pada rumah-rumah masyarakat maupun bangunan fasilitas umum dan perkantoran di wilayah ibukota Kabupaten Bombana.



Gambar 3.9 Kegiatan pembangunan SPAD-S individual yang di Desa Morengke, Desa Lakomea, dan Desa Tembe

Adapun program dan kegiatan yang mendukung pencapaian kinerja sasaran 2 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.8
Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Penunjang Pencapaian Sasaran 2

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Bidang Penanggung Jawab
A.	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	5.886.140.300	Cipta Karya
A.1	<i>Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota</i>	5.886.140.300	
1.	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	416.000.000	
2.	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	5.470.140.300	
B.	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	14.684.800.700	Cipta Karya
B.1	<i>Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota</i>	14.684.800.700	
1.	Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	770.000.000	
2.	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	109.640.000	

3.2.3. Capaian Kinerja Sasaran 3

Untuk dapat mengukur pencapaian kinerja pada sasaran 3 yaitu meningkatnya cakupan pelayanan irigasi untuk persawahan dalam mendukung pertumbuhan PDRB pada sektor pertanian, maka digunakan indikator persentase luas sawah yang mendapat layanan irigasi.

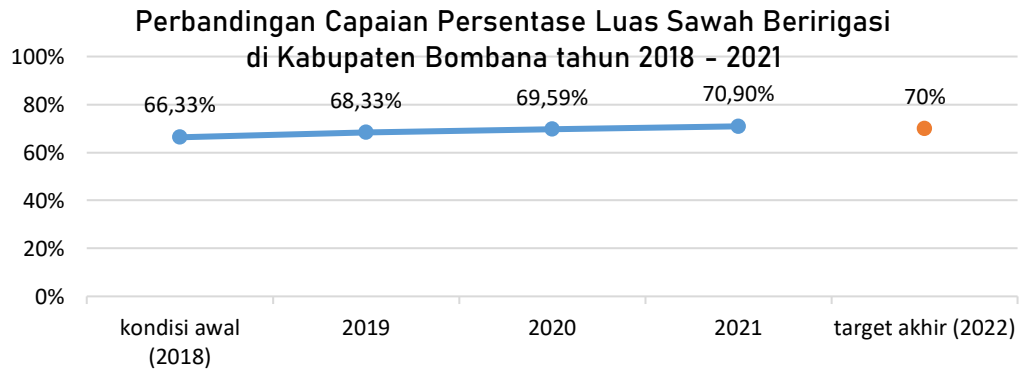
Berdasarkan data BPS Bombana Dalam Angka tahun 2022, luas sawah keseluruhan di Kabupaten Bombana pada tahun 2021 adalah 13.784,30 Ha, yang terdiri dari sawah beririgasi seluas 9.772,49 Ha (70,9%) dan sawah non irigasi seluas 4.012,81 Ha (29,1%). Realisasi pada tahun 2021 tersebut telah mencapai target yang telah ditentukan dalam Perubahan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bombana Tahun 2017 – 2022 yaitu sebesar 69%, dengan tingkat capaian 102,7% dan kategori capaian sangat baik.

Tabel 3.9
Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran 3

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Tingkat Capaian	Kategori Capaian
3.	Meningkatnya cakupan pelayanan irigasi untuk persawahan dalam mendukung pertumbuhan PDRB pada sektor pertanian	Persentase luas sawah yang mendapat layanan irigasi	%	69	70,90	102,7 %	Sangat Baik

Berdasarkan data BPS dalam Bombana Dalam Angka Tahun 2019 – 2021, terjadi peningkatan luas sawah yang beririgasi di Kabupaten Bombana sejak tahun 2018 hingga tahun 2021. Pada tahun 2018 persentase luas sawah beririgasi baru mencapai 66,33%, kemudian meningkat menjadi 68,33% pada tahun 2019, dan terus

meningkat menjadi 69,59% pada tahun 2020. Pada tahun 2021, persentase luas sawah beririgasi telah mencapai 70,90%, di mana telah melampaui target akhir yang ditetapkan dalam Perubahan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bombana Tahun 2017 – 2022 yaitu sebesar 70%.



Pada tahun 2021 terdapat ada 3 (tiga) paket kegiatan pembangunan jaringan irigasi di Kabupaten Bombana yang keseluruhannya bersumber dari DAK Penugasan Bidang Irigasi, yaitu :

1. Pembangunan jaringan irigasi DI Larolanu seluas 30 Ha di Kecamatan Kabaena Utara,
2. Rehabilitasi jaringan irigasi DI Kasipute seluas 310 Ha di Kecamatan Rumbia; dan
3. Rehabilitasi jaringan irigasi DI Kapu-kapura seluas 65 Ha di Kecamatan Poleang Utara.

Sedangkan untuk kegiatan pemeliharaan jaringan irigasi yang merupakan kegiatan rutin tahunan dilaksanakan di 8 Daerah Irigasi (DI) yang menjadi kewenangan kabupaten, dengan fokus pada pembersihan dan pengerukan saluran primer dan saluran sekunder, serta perbaikan bangunan bendung serta bangunan pintu air.



Gambar 3.3 Kegiatan pembangunan jaringan irigasi permukaan pada tahun 2021



Gambar 3.4 Kegiatan pemeliharaan jaringan irigasi tahun 2021

Adapun program dan kegiatan yang mendukung pencapaian kinerja sasaran 3 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.10
Program dan Kegiatan Penunjang Pencapaian Sasaran 3

No.	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Bidang Penanggung Jawab
A.	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	5.946.805.094	Pengairan
A.1.	<i>Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</i>	5.946.805.094	
1.	Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan	2.030.960.000	
2.	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	3.326.393.080	
3.	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	300.000.000	
4.	Operasional Unit Pengelola Irigasi	289.452.014	

3.2.4. Capaian Kinerja Sasaran 4

Untuk dapat mengukur pencapaian kinerja pada sasaran 4 yaitu meningkatnya kualitas lingkungan kawasan permukiman serta kawasan strategis, maka indikator yang digunakan adalah jumlah kawasan permukiman dan kawasan strategis yang ditingkatkan kualitas lingkungannya. Pada tahun 2021, jumlah kawasan permukiman dan kawasan strategis yang ditingkatkan adalah 10 kawasan, sehingga capaian jumlah kawasan permukiman dan kawasan strategis yang ditingkatkan hingga tahun 2021 adalah 61 kawasan. Realisasi ini telah mencapai target tahun 2021 yang telah ditetapkan dalam dokumen Perubahan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bombana Tahun 2017 – 2022 yaitu sebesar 61 kawasan dengan tingkat capaian 103% dan kategori capaian sangat baik.

Tabel 3.11
pengukuran Capaian Kinerja Sasaran 4

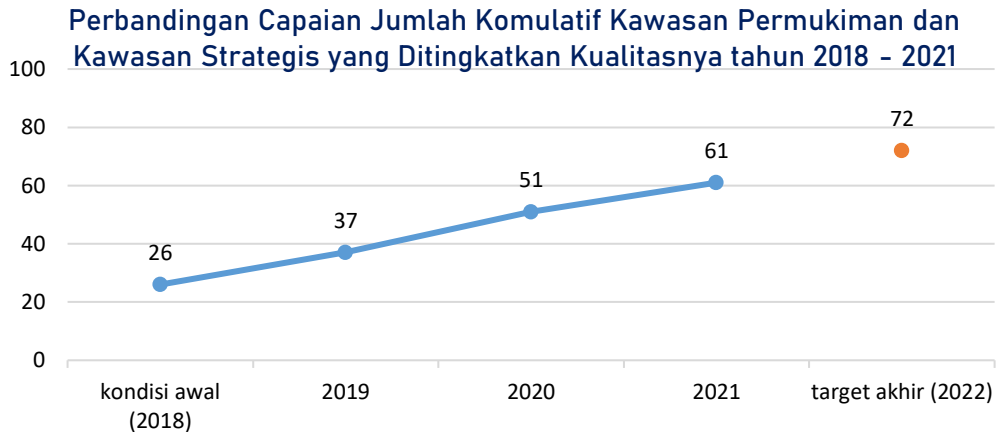
No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Tingkat Capaian	Kategori Capaian
4.	Meningkatnya kualitas lingkungan permukiman serta kawasan strategis kabupaten	Jumlah kumulatif kawasan permukiman dan kawasan strategis yang ditingkatkan kualitas lingkungannya	Kawa -san	59	61	103%	Sangat Baik

Pada tahun 2021, terdapat 10 kawasan permukiman dan kawasan strategis kabupaten yang ditangani oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bombana, yang keseluruhan anggarannya bersumber dari DAU, yang terdiri atas :

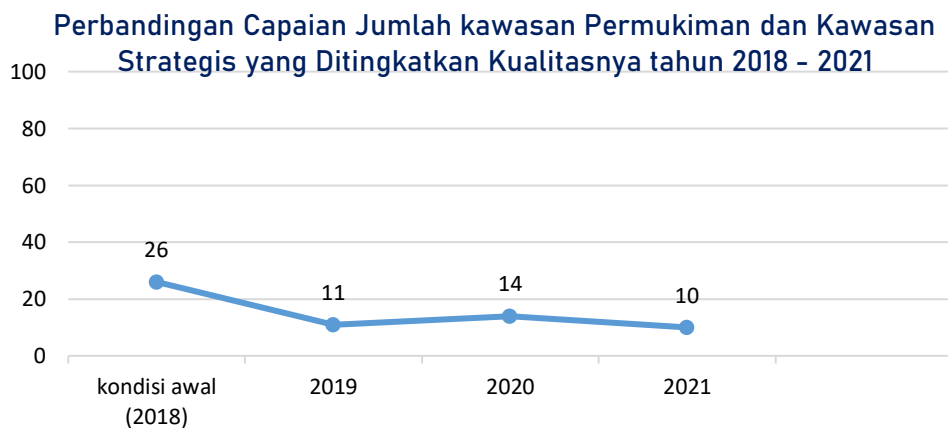
1. Pembangunan SOR Poleang di Desa Kastarib Kecamatan Poleang;
2. Pembangunan Gedung Kantor Dinas PUPR Kabupaten Bombana di Kelurahan Poea Kecamatan Rumbia Tengah;
3. Peningkatan areal parkir RTH Rumbia di Kelurahan Kampung Baru Kecamatan Rumbia Tengah;
4. Peningkatan sarana RTH Rumbia dan rehabilitasi tribun RTH Rumbia di Kelurahan Lauru Kecamatan Rumbia Tengah;
5. Pembangunan RTH ex Pasar Lama di Kelurahan Kasipute Kecamatan Rumbia;
6. Pengembangan kawasan wisata Danau Laponu-ponu di Desa Ranokomea Kecamatan Poleang Barat;
7. Pembangunan rabat beton Lorong Nener di Kelurahan Sikeli Kecamatan Kabaena Barat;
8. Pembangunan saluran drainase lingkungan di kawasan permukiman di Desa Langkowala Kecamatan Lantari Jaya;
9. Pembangunan talud saluran pembuang Kelurahan Doule;
10. Pembangunan saluran pembuang lingkungan SMK Negeri 3 Bombana

Terdapat 2 kegiatan pembangunan gedung di tahun 2021 yang masih berlanjut di tahun 2022, yaitu pembangunan Pusat Sarana Olahraga Rumbia di Kecamatan Rumbia yang merupakan pekerjaan tahun jamak (tahun 2021-2022) dan pembangunan Gedung Kantor BKD Kabupaten Bombana.

Jika dibandingkan dengan realisasi dari tahun 2018 – 2021, maka dapat dilihat adanya peningkatan yang cukup signifikan tiap tahunnya. Di mana pada tahun 2018 jumlah kumulatif kawasan permukiman dan kawasan strategis yang ditingkatkan kualitasnya adalah 26 kawasan, kemudian meningkat menjadi 37 kawasan pada tahun 2018 dan 51 kawasan pada tahun 2020. Pada tahun 2021 terus mengalami peningkatan menjadi 61 kawasan. Untuk mencapai target 72 kawasan pada tahun 2022, maka diperlukan peningkatan kawasan sebanyak 11 kawasan pada tahun 2022.



Sedangkan bila membandingkan antara jumlah kawasan permukiman dan kawasan strategis yang ditingkatkan kualitasnya tiap tahun dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2021, maka dapat dilihat pembangunan kawasan tertinggi pada tahun 2018 yaitu sebanyak 26 kawasan. Pada tahun 2019 mengalami penurunan yang cukup signifikan menjadi 11 kawasan. Kemudian meningkat lagi menjadi 14 kawasan pada tahun 2020. Realisasi pada tahun 2021 menjadi realisasi terendah yaitu hanya 10 kawasan.



Kegiatan peningkatan kualitas lingkungan permukiman dan kawasan strategis kabupaten pada tahun 2021 meliputi beberapa sektor sebagai berikut :

1. Kegiatan penanggulangan bencana banjir di kawasan permukiman berupa :
 - a) Pembangunan talud saluran pembuang Kelurahan Doule;
 - b) Pembangunan saluran pembuang lingkungan SMK Negeri 3 Bombana;
 - c) Pembangunan saluran drainase lingkungan di kawasan permukiman di Desa Langkowala Kecamatan Lantari Jaya.
2. Penataan lingkungan kawasan permukiman berupa pembangunan rabat beton jalan lingkungan di Lorong Nener Kelurahan Sikeli Kecamatan Kabaena Barat.
3. Pembangunan dan penataan bangunan gedung pemerintahan berupa :
 - d) Pembangunan Gedung Kantor Dinas PUPR Kabupaten Bombana di Kelurahan Poea Kecamatan Rumbia Tengah

4. Penataan kawasan strategis kabupaten berupa :
 - a) Peningkatan areal parkir RTH Rumbia di Kelurahan Kampung Baru Kecamatan Rumbia Tengah;
 - b) Peningkatan sarana RTH Rumbia dan rehabilitasi tribun RTH Rumbia di Kelurahan Luru Kecamatan Rumbia Tengah;
 - c) Pembangunan RTH ex Pasar Lama di Kelurahan Kasipute Kecamatan Rumbia;
 - d) Pengembangan kawasan wisata Danau Laponu-ponu di Desa Ranokomea Kecamatan Poleang Barat;
5. Peningkatan sarana dan prasarana olahraga berupa Pembangunan SOR Poleang di Desa Kastarib Kecamatan Poleang;



Gambar 3.5 Kegiatan pembangunan dan penataan kawasan permukiman dan kawasan strategis kabupaten tahun 2021

Adapun program dan kegiatan yang mendukung pencapaian kinerja sasaran 4 adalah sebagai berikut

Tabel 3.12
Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Penunjang Pencapaian Sasaran 4

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Bidang Penanggung Jawab
A.	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	2.476.500.000	Pengairan
A.1	<i>Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota</i>	2.476.500.000	
1.	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing	2.476.500.000	
B.	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	245.395.000	Cipta Karya
B.1	<i>Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota</i>	245.395.000	
1.	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	245.395.000	
C.	Program Pengembangan Permukiman	15.258.000.000	
C.1	<i>Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota</i>	15.258.000.000	
1.	Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	15.258.000.000	
D.	Program Penataan Bangunan Gedung	5.962.7888.057	
D.1	<i>Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung</i>	5.962.7888.057	

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Bidang Penanggung Jawab
1.	Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	132.613.057	Cipta Karya
2.	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	5.830.175.000	
E.	Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	6.563.160.000	
<i>E.1</i>	<i>Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>6.563.160.000</i>	
1.	Penataan Bangunan dan Lingkungan	6.563.160.000	

3.2.5. Capaian Kinerja Sasaran 5

Untuk dapat mengukur pencapaian kinerja pada sasaran 5 yaitu dengan menggunakan indikator persentase tingkat kesesuaian antara pemanfaatan ruang wilayah kabupaten dengan RTRW Kabupaten Bombana. Idealnya setiap pemanfaatan ruang wilayah haruslah mengacu kepada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) kabupaten sesuai dengan Perda Nomor 20 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bombana Tahun 2013 – 2033.

Setelah dilakukan analisis pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten Bombana selama tahun 2021 khususnya pada analisis pola ruang wilayah, maka tingkat kesesuaian antara pemanfaatan ruang dengan RTRW Kabupaten Bombana adalah 78%. Realisasi ini belum mencapai target tahun 2021 yang telah ditentukan dalam Dokumen Perubahan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bombana Tahun 2017 – 2022 yaitu 83%, dengan tingkat capaian hanya 91,8% dan kategori capaian sangat baik.

Tabel 3.13
Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran 5

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Tingkat Capaian	Kategori Capaian
1.	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan penataan ruang guna mendukung peningkatan kualitas lingkungan hidup	Persentase kesesuaian antara pemanfaatan ruang wilayah kabupaten dengan RTRW kabupaten	%	83	76	91,8%	Sangat Baik

. Terdapat beberapa faktor penyebab belum tercapainya target tingkat kesesuaian antara pemanfaatan ruang dengan RTRW Kabupaten Bombana, yaitu antara lain :

1. Perda Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) yang berlaku sebagai operasionalisasi Perda RTRW Kabupaten Bombana tidak selaras dengan RTRW Kabupaten Bombana yaitu Perda Nomor 20 tentang RTRW Kabupaten Bombana tahun 2013

- 2022. Rancangan Perda RDTR Perkotaan Rumbia telah disusun pada tahun 2021 melalui APBN Tahun 2021 di Kementerian Agraria dan Tata Ruang. Hingga tahun 2022 ini, rancangan perda RDTR tersebut sedang berlanjut tahapannya dan ditargetkan akan ditetapkan menjadi perda pada tahun 2022.
2. Tingkat akurasi peta RTRW Kabupaten Bombana yang belum memadai, menyebabkan belum konsistennya data pemanfaatan ruang yang dapat disajikan. Untuk itu sejak tahun 2020 hingga tahun 2022 ini telah dilakukan tahapan Peninjauan Kembali RTRW Kabupaten Bombana, di mana salah satu fokusnya adalah perbaikan peta-peta baik peta dasar, peta rencana maupun peta tematik, sehingga peta-peta tersebut dapat memenuhi standar yang telah ditetapkan; dan
 3. Masih terjadinya pelanggaran pemanfaatan ruang oleh beberapa pihak terutama alih fungsi peruntukan ruang, sedangkan belum ada penerapan sanksi yang tegas dari pihak yang berwenang.

Pada tahun 2021, alokasi anggaran di bidang penataan ruang mengalami penurunan yang sangat signifikan yaitu hanya Rp. 82.597.831 yang terdiri atas 1 program, 1 kegiatan, dan 1 sub kegiatan yang merupakan sub kegiatan supervisi dalam penegakan hukum di bidang penataan ruang. Pada tahun 2021 tidak ada penganggaran untuk kegiatan penyusunan dokumen perencanaan dan penataan ruang.

Adapun program dan kegiatan yang mendukung pencapaian kinerja sasaran adalah sebagai berikut :

Tabel 3.14
Program dan Kegiatan Penunjang Pencapaian Sasaran 5

No.	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Bidang Penanggung Jawab
A.	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	82.597.831	Penataan Ruang
A.1	<i>Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota</i>	82.597.831	
1.	Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang	82.597.831	

3.2.6. Capaian Kinerja Sasaran 6

Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi dokumen SAKIP tahun 2021 oleh Inspektorat Kabupaten Bombana, nilai SAKIP Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bombana pada tahun 2021 adalah 73,76 dengan kategori BB. Predikat ini telah mencapai target yang ditentukan pada tahun 2021 yaitu kategori BB, sehingga tingkat capaian mencapai 100%.

Tabel 3.15
Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran 6

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Tingkat Capaian	Kategori Capaian
6.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bombana	Hasil Evaluasi SAKIP Dinas PUPR oleh Inspektorat	Nilai	BB	BB	100%	Sangat Baik

Adapun program dan kegiatan yang mendukung pencapaian kinerja sasaran adalah sebagai berikut :

Tabel 3.16
Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Penunjang Pencapaian Sasaran 6

No.	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Bidang Penanggung Jawab
I.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	8.812.429.659	Sekretariat
A.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	307.664.974	
1.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	127.350.730	
2.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	11.742.987	
3.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	6.673.442	
4.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	161.897.815	
B.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.945.878.146	
1.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.671.499.656	
2.	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	243.107.821	
3.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	9.719.364	
4.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	21.551.305	
C.	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	41.926.033	
1.	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	14.400.000	
2.	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	27.526.033	
D.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	84.500.000	
1.	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	59.500.000	
2.	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	25.000.000	
E.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	758.782.506	
1.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.992.038	
2.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	16.400.000	
3.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	50.932.572	
4.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	10.356.096	
5.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	16.800.000	
6.	Fasilitasi Kunjungan Tamu	12.000.000	
7.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	561.701.800	
8.	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	87.600.000	
F.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2.355.000.000	
1.	Pengadaan Alat Besar	2.355.000.000	
2.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	139.968.000	
3.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	288.000	
4.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	92.280.000	
5.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	47.400.000	

G.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	178.710.000	Sekretariat
1.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	82.500.000	
2.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	30.000.000	
3.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	6.420.000	
4.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	56.790.000	
5.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	3.000.000	
II.	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	61.125.867	Bidang Pengawasan
A.	Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	61.125.867	
1.	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	61.125.867	

3. 3. REALISASI ANGGARAN

Untuk mencapai target sasaran strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bombana pada tahun 2021, maka anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bombana yang dianggarkan pada APBD Kabupaten Bombana Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp. 142.532.547.183 yang terdiri atas :

- 1) Belanja Operasi sebesar Rp. 26.576.858.933
 - a) Belanja Pegawai : Rp. 4.934.507.656
 - b) Belanja Barang dan Jasa : Rp. 21.642.351.277
- 2) Belanja Modal sebesar Rp. 115.955.688.250
 - a) Belanja Modal Peralatan dan Mesin : Rp. 2.406.913.000
 - b) Belanja Modal Gedung dan Bangunan : Rp. 25.309.663.000
 - c) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi : Rp. 88.174.112.250
 - d) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya : Rp. 65.000.000

Adapun realisasi anggaran pada tahun 2021 sebesar Rp. 117.995.457.061 dengan persentase 82,78%, yang terdiri atas :

- 1) Realisasi Belanja Operasi sebesar Rp. 25.370.090.261 dengan persentase realisasi sebesar 95,46%;
 - a) Belanja Pegawai : Rp. 4.857.058.390 (98,43%)
 - b) Belanja Barang dan Jasa : Rp. 20.513.031.871 (94,78%)
- 2) Realisasi Belanja Modal sebesar Rp. 92.625.366.8000 dengan persentase realisasi sebesar 79,88%.
 - a) Belanja Modal Peralatan dan Mesin : Rp. 2.405.408.700 (99,94%)
 - b) Belanja Modal Gedung dan Bangunan : Rp. 14.314.456.000 (56,56%)
 - c) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi : Rp. 75.840.502.100 (86,01%)
 - d) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya : Rp. 65.000.000 (100%)

Realisasi anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bombana tahun 2021 dapat dilihat secara rinci pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.17
Perbandingan antara Capaian Kinerja dan Realisasi Keuangan
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bombana tahun 2021

No.	KINERJA						KEUANGAN			
	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Sat.	Target	Realisasi	Tingkat Capaian	Program/Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggaran (Rp.)	%
1.	Meningkatnya kualitas dan kapasitas infrastruktur jalan kabupaten dalam mendukung konektivitas wilayah	Persentase panjang jalan kabupaten dalam kondisi mantap (kondisi baik dan sedang)	%	79	79,59	100,7%	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	89.682.050.375	77.440.506.475	86
							<i>Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota</i>	<i>89.682.050.375</i>	<i>77.440.506.475</i>	<i>86</i>
							1. Survei Kondisi Jalan/Jembatan	711.430.000	711.430.000	100
							2. Rekonstruksi Jalan	79.221.576.175	67.477.624.775	85
							3. Rehabilitasi Jalan	6.526.550.000	6.337.800.000	97
							4. Pembangunan Jembatan	897.464.200	848.428.200	95
							5. Penggantian Jembatan	2.025.030.000	1.765.223.500	87
6. Rehabilitasi Jembatan	300.000.000	300.000.000	100							
2.	Meningkatnya akses masyarakat terhadap pelayanan air minum aman dan sanitasi layak	Persentase jumlah rumah tangga yang memiliki akses air minum terlindungi	%	97	91,18	94%	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	5.886.140.300	5.654.893.800	96
							<i>Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>5.886.140.300</i>	<i>5.654.893.800</i>	<i>96</i>
							1. Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	416.000.000	415.300.000	99
							2. Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	5.470.140.300	5.239.593.800	96
		Persentase jumlah rumah tangga yang memiliki fasilitas air limbah domestik	%	84	82,01	97,6%	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	1.555.555.000	1.555.257.302	99
							<i>Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>1.555.555.000</i>	<i>1.555.257.302</i>	<i>99</i>
							1. Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	1.445.915.000	1.445.915.000	100
2. Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	109.640.000	109.342.302	99							

No.	KINERJA						KEUANGAN			
	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Sat.	Target	Realisasi	Tingkat Capaian	Program/Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggaran (Rp.)	%
3.	Meningkatnya cakupan pelayanan irigasi untuk persawahan dalam mendukung pertumbuhan PDRB pada sektor pertanian	Persentase luas sawah yang mendapat layanan irigasi	%	69	?	?	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	5.946.805.094	5.112.288.000	95
							<i>Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</i>	5.946.805.094	5.112.288.000	95
							1. Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan	2.030.960.000	1.929.412.000	95
							2. Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	3.326.393.080	3.182.876.000	96
							3. Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	300.000.000	300.000.000	100
4. Operasional Unit Pengelola Irigasi	289.452.014	287.969.200	99							
4.	Meningkatnya kualitas lingkungan kawasan permukiman dan kawasan strategis serta kawasan strategis	Jumlah kawasan permukiman dan kawasan strategis yang ditingkatkan kualitas lingkungannya	Kaw.	59	61	103%	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	2.476.500.000	2.328.970.000	94
							<i>Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</i>	2.476.500.000	2.328.970.000	94
							1. Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing	2.476.500.000	2.328.970.000	94
							Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	245.395.000	245.145.000	99
							<i>Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota</i>	245.395.000	245.145.000	99
							1. Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	245.395.000	245.145.000	99
							Program Pengembangan Permukiman	15.258.000.000	6.941.935.000	45
<i>Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota</i>	15.258.000.000	6.941.935.000	45							
1. Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	15.258.000.000	6.941.935.000	45							

No.	KINERJA						KEUANGAN			
	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Sat.	Target	Realisasi	Tingkat Capaian	Program/Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggaran (Rp.)	%
							Program Penataan Bangunan Gedung	5.962.788.057	3.325.979.300	56
							<i>Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung</i>	5.962.788.057	3.325.979.300	56
							1. Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	132.613.057	129.980.800	98
							2. Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	5.830.175.000	3.195.998.500	55
							Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	6.563.160.000	5.947.236.500	91
							<i>Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota</i>	6.563.160.000	5.947.236.500	91
							1. Penataan Bangunan dan Lingkungan	6.563.160.000	5.947.236.500	91
5.	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan penataan ruang guna mendukung peningkatan kualitas lingkungan hidup	Persentase kesesuaian antara pemanfaatan ruang wilayah kabupaten dengan RTRW kabupaten	%	81	78	91,8%	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	82.597.831	82.433.300	99
							<i>Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota</i>	82.597.831	82.433.300	99
							1. Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang	82.597.831	82.433.300	99
6.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bombana	Hasil Evaluasi SAKIP Dinas PUPR oleh Inspektorat	Nilai	B	?	?	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	8.812.429.659	8.711.761.884	99
							<i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	307.664.974	306.664.900	99
							1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	127.350.730	127.114.900	99
							2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	11.742.987	11.721.500	99
							3. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	6.673.442	6.204.000	93

No.	KINERJA					KEUANGAN				
	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Sat.	Target	Realisasi	Tingkat Capaian	Program/Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggaran (Rp.)	%
							4. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	161.897.815	161.624.500	99
							<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	4.945.878.146	4.868.615.410	98
							1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.671.499.656	4.596.758.390	98
							2. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	243.107.821	240.697.000	99
							3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	9.719.364	9.617.600	99
							4. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	21.551.305	21.542.420	100
							<i>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</i>	41.926.033	31.631.099	75
							1. Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	14.400.000	4.437.899	31
							2. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	27.526.033	27.193.200	99
							<i>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i>	84.500.000	82.084.376	97
							1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	59.500.000	59.300.000	99
							2. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	25.000.000	22.784.376	91
							<i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	758.782.506	757.481.273	99
							1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.992.038	2.991.000	99
							2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	16.400.000	16.378.700	99
							3. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	50.932.572	50.927.750	99
							4. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	10.356.096	10.355.800	99
							5. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	16.800.000	16.800.000	100
							6. Fasilitasi Kunjungan Tamu	12.000.000	11.999.400	99
							7. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	561.701.800	560.428.623	99
							8. Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	87.600.000	87.600.000	100

No.	KINERJA					KEUANGAN				
	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Sat.	Target	Realisasi	Tingkat Capaian	Program/Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggaran (Rp.)	%
							<i>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	2.355.000.000	2.354.000.000	99
							1. Pengadaan Alat Besar	2.355.000.000	2.354.000.000	99
							<i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	139.968.000	135.465.691	97
							1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	288.000	0	0
							2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	92.280.000	90.797.215	98
							3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	47.400.000	44.668.476	94
							<i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	178.710.000	175.819.135	98
							1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	82.500.000	79.768.635	97
							2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	30.000.000	29.929.000	99
							3. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	6.420.000	6.386.500	99
							4. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	56.790.000	56.735.000	99
							5. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	3.000.000	3.000.000	100
							Program Pengembangan Jasa Konstruksi	61.125.867	61.081.300	99
							<i>Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi</i>	61.125.867	61.081.300	99
							1. Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	61.125.867	61.081.300	99

BAB IV

PENUTUP

Pengukuran kinerja merupakan suatu alat manajemen yang digunakan untuk meningkatkan akuntabilitas dalam rangka menilai keberhasilan/kegagalan atau tercapai/tidaknya tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan pada rencana strategis jangka menengah instansi dalam rangka mewujudkan visi dan misi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bombana.

Berdasarkan pengukuran tingkat capaian pada setiap indikator sasaran strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bombana pada tahun 2020, dapat disimpulkan bahwa tingkat capaian kinerja sasaran strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bombana pada tahun 2021 termasuk dalam katagori sangat baik, karena rata-rata tingkat capaian kinerja sasaran strategis %. Nilai tersebut jauh lebih tinggi dibandingkan dengan tingkat realisasi keuangan yang hanya 82,78%, sehingga dapat disimpulkan juga adanya efisiensi dalam penggunaan anggaran pada tahun 2021.

Namun demikian, masih terdapat beberapa indikator sasaran strategis yang tidak mencapai target yang telah ditetapkan. Hal ini disebabkan antara lain karena keterbatasan anggaran bahkan tidak tersedianya anggaran pada beberapa program dan kegiatan pendukungnya.

Dengan demikian diperlukan komitmen dan dukungan semua pihak untuk terus meningkatkan pembangunan infrastruktur di wilayah Kabupaten Bombana baik kuantitas maupun kualitas, sehingga dapat meningkatkan konektivitas wilayah, tingkat perekonomian masyarakat, dan dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan hidup sesuai dengan visi Kabupaten Bombana Tahun 2017 – 2022 yaitu mewujudkan masyarakat Bombana yang sejahtera (Munajah).